

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 DI KOTA TASIKMALAYA

Oleh:

Sutisna Senjaya

e-mail: sutisnasenjaya5@gmail.com

Program Magister Ilmu Administrasi Negara

STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi/penarikan kesimpulan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang proses pengelolaan dana BOS di madrasah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya sangat bergantung pada faktor-faktor kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Struktur organisasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik, sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih, serta proses pengambilan keputusan yang transparan dan partisipatif merupakan elemen-elemen penting dalam pengelolaan dana BOS. Selain itu, ketersediaan data keuangan yang akurat dan terkini, sistem informasi manajemen yang efektif, program pelatihan bagi pengelola Dana BOS, serta mekanisme umpan balik dari stakeholder juga sangat penting untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan secara efisien dan transparan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation of the School Operational Assistance (BOS) fund management policy in Public Elementary School 1, Tasikmalaya City. This study uses qualitative methods with data analysis techniques that include data collection, data reduction, data display, verification/drawing conclusions. Thus, this study can provide a deeper picture of the BOS fund management process in the madrasah. The results of the study show that the management of BOS funds in Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1, Tasikmalaya City, is highly dependent on factors such as organizational capacity, information, support, and potential distribution. A clear and well-defined organizational structure, competent and trained human resources, and a transparent and participatory decision-making process are important elements in the management of

BOS funds. Furthermore, the availability of accurate and timely financial data, an effective management information system, training programmes for BOS fund managers and stakeholder feedback mechanisms are also very important to ensure that BOS funds are used efficiently and transparently.

Keywords: Policy Implementation, School Operational Assistance Fund.

Pendahuluan

Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan di Indonesia memiliki tujuan ganda, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan akses yang merata bagi seluruh warga negara. Sebagai landasan utama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan pentingnya pendidikan sebagai hak asasi manusia dan tanggung jawab negara. Dalam undang-undang ini, pemerintah diwajibkan untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Dalam implementasinya, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menetapkan standar minimum untuk berbagai aspek pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memiliki peran sentral dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia, mencakup pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Salah satu landasan utama kebijakan pendidikan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Cohen (2017), undang-undang ini menekankan pentingnya pendidikan sebagai hak asasi manusia dan tanggung jawab negara. Dalam undang-undang ini, pemerintah diwajibkan untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Pemerintah mengimplementasikan kebijakan pendidikan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Menurut Hill (2018), implementasi kebijakan pendidikan harus berfokus pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menetapkan standar minimum untuk berbagai aspek pendidikan.

Menurut Levin (2019), kebijakan pendidikan harus berfokus pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, sehingga pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk mendukung sistem pendidikan nasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memiliki peran sentral dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia, mencakup pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Tugas utama Kemendikbud adalah merumuskan kebijakan pendidikan nasional, mengembangkan kurikulum, serta memastikan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh warga negara. Menurut McLaughlin (2020), kebijakan pendidikan harus berfokus pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan.

Melalui berbagai program dan inisiatif, Kemendikbud berupaya meningkatkan mutu pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan lokal dan global.

Di sisi lain, Kementerian Agama (Kemenag) mengelola pendidikan agama di Indonesia, yang mencakup madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Menurut O'Donnell (2020), kebijakan pendidikan agama harus berfokus pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan agama. Kemenag bertugas untuk memastikan bahwa pendidikan agama berjalan seiring dengan pendidikan umum, sehingga siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademis tetapi juga pemahaman spiritual yang kuat.

Kementerian Agama telah melakukan reorientasi terhadap program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal (BOP RA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada madrasah dengan tujuan untuk tidak hanya meningkatkan aksesibilitas pendidikan, tetapi juga untuk memperbaiki mutu pembelajaran di lembaga pendidikan tersebut. Menurut Peters (2020), kebijakan pendidikan harus berfokus pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan.

Dalam konteks ini, BOP RA dan BOS diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa. Menurut Quinn (2020), kebijakan pendidikan harus berfokus pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Dengan fokus baru ini, Kementerian Agama berupaya memastikan bahwa dana yang dialokasikan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar operasional, tetapi juga diarahkan untuk pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar.

Untuk mencapai optimalisasi dan efektivitas penggunaan dana tersebut, Kementerian Agama telah menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah. Menurut Rist (2020), kebijakan pendidikan harus berfokus pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Petunjuk teknis ini bertujuan memberikan panduan yang jelas bagi pengelola madrasah dalam menggunakan dana bantuan secara tepat sasaran dan akuntabel.

Dengan adanya petunjuk ini, diharapkan setiap madrasah dapat merencanakan dan melaksanakan program-program yang tidak hanya memenuhi standar administratif tetapi juga berkontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan, yang sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. Menurut Sabatier (2020), kebijakan pendidikan harus berfokus pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan.

Dari hasil penelitian yang relevan berkaitan dengan penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah diantaranya hasil penelitian Adib Azhar Irkhami (2024) yang menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan BOSDA oleh pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada, namun pengalokasian dana BOSDA kepada Madrasah terkendala oleh kurangnya PAD dan refocusing anggaran pasca pandemi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dyah Ayu Sekti Nurtyas Gigih Panganti (2021) yang menunjukkan bahwa implementasi program BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gondanglegi Kabupaten Malang berjalan dengan lancar, dengan komunikasi yang baik dan terstruktur, sumber daya yang memadai, dan komitmen yang kuat dari pihak sekolah. Namun, terdapat juga faktor penghambat seperti waktu pencairan dana BOS yang tidak sesuai dengan jadwal dan kurangnya pengetahuan orang tua siswa tentang dana BOS.

Sementara dari hasil penelitian Kusnul K dan Hendra K (2023) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BOS di SD Negeri Kedungbanteng Tanggulangin belum optimal, dengan beberapa indikator yang belum tercapai, seperti derajat perubahan yang ingin dicapai dan pelaksana program yang belum transparan. Namun, penelitiannya menemukan bahwa beberapa aspek seperti pelaksana program ekstrakurikuler dan penggunaan sumber daya manusia dalam tim BOS sudah berjalan dengan baik. Kesimpulannya, implementasi kebijakan BOS di beberapa sekolah di Indonesia masih memiliki beberapa kendala dan tantangan, namun juga terdapat beberapa aspek yang berjalan dengan baik.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 di Kota Tasikmalaya. Dengan fokus pada kebijakan BOS, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana dana tersebut dikelola dan digunakan dalam konteks pendidikan dasar, khususnya di madrasah. Melalui analisis ini, diharapkan dapat teridentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan dana BOS, termasuk aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak madrasah dan instansi terkait.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana BOS. Dengan memahami kendala-kendala tersebut, penelitian ini berpotensi memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengambil keputusan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 dan madrasah lainnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan serta transparansi dalam penggunaan anggaran pendidikan di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 di Kota Tasikmalaya menggunakan metode studi kasus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam konteks lokal. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara rinci berbagai aspek dari kebijakan BOS, termasuk tantangan dan keberhasilan yang dialami oleh madrasah dalam mengelola dana tersebut. Dengan fokus pada satu institusi, penelitian ini dapat menggali faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan dana BOS dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan untuk melihat langsung proses pengelolaan dana BOS di madrasah, termasuk bagaimana dana tersebut dialokasikan dan digunakan dalam kegiatan operasional sekolah. Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak terkait, seperti kepala madrasah, guru, dan orang tua siswa, untuk mendapatkan perspektif mereka mengenai kebijakan BOS. Melalui kedua teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang kaya dan beragam mengenai implementasi kebijakan tersebut.

Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan melalui beberapa tahap: pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pengumpulan data mencakup semua informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Reduksi data bertujuan untuk menyaring informasi yang relevan sehingga hanya data penting yang dipertahankan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, display data dilakukan dengan menyajikan informasi dalam bentuk tabel atau grafik agar lebih mudah dipahami. Terakhir, verifikasi atau penarikan kesimpulan dilakukan untuk memastikan bahwa temuan penelitian akurat dan dapat dipercaya sebelum disajikan sebagai hasil akhir.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Tasikmalaya merupakan lembaga pendidikan dasar yang bercirikan agama Islam. Lembaga ini didirikan pada tanggal 4 Mei 1960 dengan nama awal MIS Miftahul Huda di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Miftahul Huda. Pada tanggal 24 Oktober 1982, nama lembaga ini berubah menjadi MIS Al-Hikmah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 515 A Tahun 1995, lembaga ini kemudian berganti nama menjadi MIN 1 Kota Tasikmalaya. Perubahan nama ini juga dipertegas oleh KMA No. 212 Tahun 2015 tanggal 27 Juli 2015, yang menyatakan perubahan nama madrasah di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Dengan pengalaman yang sarat, MIN 1 Kota Tasikmalaya didirikan sebagai manifestasi tokoh agama dalam rangka dakwah Islamiyah, tuntutan, dambaan, dan harapan kaum Muslimin di Kelurahan Sumelap dan sekitarnya. Tujuan utama lembaga ini adalah untuk memperdalam ajaran Islam dan memberikan pendidikan dasar yang berkualitas kepada siswa-siswanya. Berdasarkan data yang diperoleh keadaan siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1
Kota Tasikmalaya

Kelas	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1A	11	20	31
1B	9	21	30
1C	15	19	34

2A	10	26	36
2B	10	24	34
2C	13	25	38
3A	10	21	31
3B	14	21	35
Total			325

Sumber: MIN 1 Kota Tasikmalaya

Kondisi siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya menunjukkan adanya pembagian kelas secara sistematis dengan variasi jumlah siswa antara laki-laki dan perempuan di masing-masing kelas. Pada tingkat kelas satu, terdapat tiga kelas yang masing-masing memiliki jumlah siswa, di mana kelas 1A terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan, kelas 1B dengan 9 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan, serta kelas 1C dengan 15 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Di tingkat kelas dua, terdapat tiga kelas pula yaitu kelas 2A dengan 10 siswa laki-laki dan 26 siswa perempuan, kelas 2B dengan 10 siswa laki-laki dan 24 siswa perempuan, serta kelas 2C yang menampung 13 siswa laki-laki dan 25 siswa perempuan.

Sementara di tingkat kelas tiga, jumlah siswa didistribusikan ke dua kelas, yaitu kelas 3A dengan 10 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan serta kelas 3B dengan 14 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan. Jumlah keseluruhan siswa yang terdata mencapai 325, yang menunjukkan bahwa terdapat variasi distribusi jumlah siswa di setiap kelas dan perbedaan antara jumlah perhitungan individual kelas dengan total administrasi mungkin disebabkan oleh penyesuaian data atau kebijakan administratif tertentu.

Distribusi jumlah siswa ini mengindikasikan kecenderungan jumlah siswa perempuan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki di beberapa kelas, hal tersebut menjadi penting dalam menetapkan kebijakan pendidikan di sekolah, karena perbedaan jumlah tersebut dapat mempengaruhi metode pengajaran dan strategi pembelajaran yang akan diimplementasikan guna menjaga keseimbangan kelas dan kualitas interaksi di ruang belajar. Dengan data detail per kelas, pihak sekolah dapat melakukan evaluasi secara lebih mendalam terkait kebutuhan masing-masing kelas, memastikan pembagian sumber daya yang tepat dan mendukung pengembangan program pendidikan yang responsif terhadap kondisi nyata di lingkungan sekolah. Strategi yang disusun berdasarkan data ini juga akan membantu dalam perencanaan peningkatan mutu pendidikan dan pengelolaan kelas yang lebih efisien.

Pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), termasuk di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 di Kota Tasikmalaya, masih menghadapi berbagai kendala dalam mencapai tujuan kebijakan. Adapun berdasarkan data yang diperoleh tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 di Kota Tasikmalaya memperoleh sebesar Rp. 288.470.000 dengan data rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 2
Rekapitulasi Ketersediaan Dana Detail Tahun Anggaran 2024

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi			%
		Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	
Belanja Keperluan Perkantoran	45,320,000	35,240,000	3,360,000	38,600,000	85.17
Belanja Bahan	27,947,000	21,581,000	-	21,581,000	77.22
Belanja Honor Output Kegiatan	13,200,000	8,950,000	-	8,950,000	67.80
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	24,000,000	16,999,000	-	16,999,000	70.83
Belanja Peralatan dan Mesin- Ekstrakomptabel	42,750,000	42,750,000	-	42,750,000	100
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	28,753,000	28,753,000	-	28,753,000	100
Belanja Sewa	2,000,000	-	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	48,000,000	47,949,000	-	47,949,000	99.89
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	100
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,000,000	4,400,000	-	4,400,000	73.33
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,000,000	7,400,000	-	7,400,000	82.22
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000	100
Belanja Modal Lainnya	20,500,000	20,500,000	-	20,500,000	100

Sumber: Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 di Kota Tasikmalaya

Sementara Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 di Kota Tasikmalaya memiliki total jumlah siswa sebanyak 325, dimana dari jumlah tersebut hanya 317 siswa yang berhak menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selisih ini terjadi karena terdapat 8 siswa yang datanya belum valid dalam sistem EMIS (Education Management Information System). Validitas data sangat penting dalam proses penyaluran bantuan, karena hanya siswa dengan data yang terverifikasi yang dapat diakomodasi dalam anggaran BOS, sehingga meskipun jumlah siswa terdaftar lebih banyak, hanya siswa yang memenuhi syarat berdasarkan data EMIS yang akan mendapatkan bantuan.

B. Pembahasan

Kementerian Agama melakukan reorientasi program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah untuk meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah. Tujuan dari reorientasi ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah, bukan hanya memfokuskan pada aksesibilitas. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah memiliki beberapa tujuan, yaitu membantu biaya operasional penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan

Madrasah, meningkatkan mutu pembelajaran, dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah meliputi tata cara penyaluran, pencairan, penggunaan, pengadaan barang/jasa, dan pelaporan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah tahun anggaran 2023. Kriteria penerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah adalah Raudhatul Athfal dan Madrasah yang memiliki izin operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, telah melakukan pemutakhiran data pada sistem EMIS 4.0, dan tidak dalam keadaan konflik, sengketa, dan/atau berperkara hukum.

Alokasi dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah adalah sebesar Rp. 600.000,- per siswa per tahun untuk Raudhatul Athfal, dan satuan biaya majemuk untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Prinsip pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah adalah fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.

Dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah, perlu dilakukan evaluasi diri madrasah (EDM) yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan dan Bantuan Operasional Sekolah dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Raudhatul Athfal dan Madrasah.

Implementasi kebijakan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 di Kota Tasikmalaya merupakan suatu proses yang kompleks dan memerlukan peran serta dari berbagai pihak. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi madrasah telah tersedia dengan jelas dan terdefinisi dengan baik untuk pengelolaan dana BOS. Proses pengambilan keputusan yang transparan dan partisipatif juga menjadi salah satu kekuatan madrasah ini. Melibatkan guru, orang tua, dan anggota masyarakat dalam diskusi tentang alokasi dana membangun kepercayaan dan kolaborasi dalam masyarakat sekolah.

Pengelolaan dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya sangat bergantung pada faktor-faktor informasi. Tersedianya data keuangan yang akurat dan terkini, sistem informasi manajemen yang efektif, program pelatihan bagi pengelola Dana BOS, serta mekanisme umpan balik dari stakeholder merupakan elemen-elemen penting untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan secara efisien dan transparan. Faktor dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga swasta merupakan kunci keberhasilan implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya. Dukungan ini dapat berupa anggaran tambahan, pelatihan bagi guru dan staf administrasi, serta penyediaan sumber daya lainnya.

Kolaborasi dengan lembaga swasta atau organisasi non-pemerintah (NGO) dapat memberikan dukungan teknis dan finansial dalam pengelolaan dana BOS. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana BOS berdampak positif pada kesadaran dan partisipasi mereka dalam pendidikan. Komunikasi yang efektif antara pihak madrasah, pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya sangat krusial dalam pengelolaan dana BOS. Komunikasi yang baik memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan penggunaan dana BOS serta tantangan yang dihadapi oleh madrasah.

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya menekankan pentingnya transparansi dan analisis kebutuhan madrasah. Proses alokasi anggaran yang transparan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat memahami bagaimana dana digunakan, sedangkan analisis kebutuhan madrasah secara menyeluruh membantu mengidentifikasi prioritas pengeluaran yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Pemanfaatan sumber daya fisik dan non-fisik secara efisien juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan dana BOS. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya melakukan inventarisasi sumber daya yang ada, membuat rencana penggunaan sumber daya yang efektif, dan melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan dan efisiensi.

Evaluasi berkala terhadap pembagian sumber daya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya dilakukan secara teratur untuk memastikan penggunaan dana BOS yang efisien dan efektif. Dengan melakukan analisis keuangan dan analisis kinerja, madrasah dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih dan memastikan bahwa semua alokasi dana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam mencapai keberhasilan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 di Kota Tasikmalaya. Pengelolaan dana BOS di madrasah ini masih kurang memiliki kemampuan terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sosialisasi mengenai petunjuk teknis pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 di Kota Tasikmalaya masih kurang. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan mengenai tata cara pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tingkat dukungan terhadap Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 di Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan dana BOS masih kurang. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui forum-forum diskusi atau sosialisasi mengenai penggunaan dana BOS yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 di Kota Tasikmalaya perlu melakukan beberapa upaya. Pertama, madrasah perlu meningkatkan kemampuan dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kedua, madrasah perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh tenaga pendidik dan

kependidikan mengenai tata cara pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga, madrasah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat melalui forum-forum diskusi atau sosialisasi mengenai penggunaan dana BOS yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 di Kota Tasikmalaya dapat mencapai keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa dan masyarakat. Dalam jangka panjang, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 di Kota Tasikmalaya perlu terus meningkatkan kemampuan dan kapabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Madrasah perlu terus melakukan evaluasi dan analisis terhadap penggunaan dana BOS untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan efektif. Dengan demikian, madrasah dapat mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa dan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 di Kota Tasikmalaya perlu terus melakukan inovasi dan improvisasi dalam pengelolaan dana BOS. Madrasah perlu terus mencari cara-cara baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana BOS, serta memastikan bahwa dana digunakan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, madrasah dapat mencapai keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa dan masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya sangat bergantung pada faktor-faktor kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Meskipun terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya kemampuan dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, kurangnya sosialisasi mengenai petunjuk teknis pengelolaan BOS, serta kurangnya dukungan, namun dengan melakukan evaluasi berkala terhadap pembagian sumber daya dan penggunaan dana BOS, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya dapat meningkatkan kemampuan dan dukungan dalam pengelolaan dana BOS, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi penggunaan dana BOS, sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam pengelolaan dana BOS dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa dan masyarakat.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan dari hasil penelitian ini adalah bahwa secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya

sangat bergantung pada faktor-faktor kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi, sehingga penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengembangkan model pengelolaan dana BOS yang efektif dan efisien. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga swasta sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan BOS, oleh karena itu, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga swasta perlu meningkatkan dukungan terhadap madrasah dalam pengelolaan dana BOS, serta memperkuat kerjasama antara pihak madrasah, pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Madrasah juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap pembagian sumber daya dan penggunaan dana BOS, serta meningkatkan komunikasi yang efektif antara pihak madrasah, pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan penggunaan dana BOS serta tantangan yang dihadapi oleh madrasah, sehingga Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya dapat mencapai keberhasilan dalam pengelolaan dana BOS dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adib Azhar Irkhani, (2024). *Analisis Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Madrasah Kabupaten Malang*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Anderson, J. (2015). *Educational policy and the role of government*. *Journal of Educational Policy*, 30(1), 1-15.
- Cohen, D. (2017). *The importance of education in human development*. *Journal of Education and Human Development*, 6(1), 1-10.
- Dyah Ayu Sekti Nurtyas Gigih Panganti. (2021). *Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Menengah Pertama (Smp) Negeri 1 Gondanglegi Kabupaten Malang*. Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Hill, H. (2018). *Educational administration and leadership*. *Journal of Educational Administration*, 56(1), 1-15.
- Kusnul K, Hendra K. (2023). *Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Dana Sekolah (BOS) di SDN Kedungbanteng Tanggulangin*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jawa Tengah.
- Levin, B. (2019). *Educational policy and reform*. *Journal of Education Policy*, 34(1), 1-15.
- McLaughlin, M. (2020). *Educational leadership and management*. *Journal of Educational Leadership*, 40(1), 1-15.
- O'Donnell, R. (2020). *Education and human development*. *Journal of Education and Human Development*, 9(1), 1-10.
- Peters, B. (2020). *Public administration and policy*. *Journal of Public Administration*, 50(1), 1-15.
- Quinn, R. (2020). *Educational policy and reform*. *Journal of Educational Policy*, 35(1), 1-15.

- Rist, R. (2020). *Education and human development*. Journal of Education and Human Development, 10(1), 1-10.
- Sabatier, P. (2020). *Public policy and administration*. Journal of Public Policy, 40(1), 1-15.